

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki 17.499 pulau yang memanjang dari Sabang hingga Merauke serta luas wilayahnya mencapai 7,81 juta km² yang terbagi menjadi wilayah lautan sebesar 3,25 juta km², Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,55 juta km² dan sisanya sebesar 2,012 juta km² merupakan wilayah daratan (Aditya, 2020).

Dengan keunggulan geografis yang dimiliki oleh Indonesia tersebut tentunya banyak sektor di wilayah perairan yang bisa dijadikan sebagai sarana perekonomian itu mengalir. Salah satunya ialah di wilayah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Semenanjung Malaysia. Kepulauan Riau terdiri dari lebih dari lebih kurang 2.500 pulau (Dinkesprovkepri, 2008), dengan Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun menjadi yang terbesar.

Provinsi ini memiliki lokasi yang cukup strategis di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang membuatnya menjadi pusat perdagangan dan investasi. Kepulauan Riau telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Batam dan Bintan menjadi pusat industri dan pariwisata yang penting di Indonesia.

Wilayah ini juga dikenal karena keindahan kehidupan lautnya, dengan banyak tempat penyelaman yang menawarkan pemandangan terumbu karang yang memukau. Kepulauan Riau sendiri bisa dibilang merupakan daerah yang dengan 96 persen wilayahnya ialah perairan. Hal ini lah yang membuat pemerintahan Kepulauan Riau sangat mendukung akan adanya konsep *Blue Economy* yang berkembang.

Dalam konsep *Blue Economy* ini negara Indonesia memiliki Kerjasama dengan beberapa negara, yang dimana Indonesia tergabung dalam IMT-GT singkatan dari Indonesia, Malaysia, Thailand, *Growth Triangle*. Organisasi ini merupakan Kerjasama antara tiga negara yang membentuk segitiga ekonomi yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kerjasama ini juga melibatkan berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, infrastruktur dan juga pariwisata. Organisasi IMT-GT ini merupakan sebuah Kerjasama subregional yang dibentuk pada tahun 1993. Segitiga pertumbuhan ini ada karena adanya sebuah dorongan yang berlandaskan komitmen politik yang cukup kuat antar tiga negara tersebut.

Sejak didirikannya organisasi IMT-GT ini sudah banyak program pengembangan yang disepakati bersama yang dimana pengembangan implementasi itu mulai tumbuh baik walaupun masih belum terbilang masif. Dari Kerjasama subregional ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi tiga negara tersebut yang dimana dari tiga negara ini memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang ekonomi, dengan tanah yang cukup luas, sumber daya alam yang melimpah serta pasar yang mendukung.

Kerjasama IMT-GT ini lebih menekankan pada penguatan Kerjasama dalam hal seperti teknologi, inovasi, dan juga pengembangan sumber daya manusianya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kawasan tersebut. *Blue economy* sendiri dalam forum IMT-GT ini telah menjadi focus perhatian global, yang dimana khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya laut yang cukup besar dan juga signifikan. Pada tanggal 29/9/2023 adanya pelaksanaan forum pertemuan Menteri IMT-GT, di Kota Batam. Dalam forum tersebut juga membahas yang dimana dalam Kerjasama tiga negara ini sepakat untuk bersama sama menumbuhkan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan berbasis *Blue Economy* dan juga *Green Growth* (Zulfikar, 2023)

Blue Economy sendiri telah banyak di advokasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai sebuah konsep dan strategi untuk menjaga lautan dan sumberdaya alam di dunia. Konsep dari *Blue Economy* sendiri diambil karena diyakini dapat menjamin kelestarian sumberdaya dan ekosistem yang ada di laut secara berkepanjangan mengingat negara Indonesia merupakan negara maritim yang luas akan lautnya yang dapat dimanfaatkan menjadi ladang ekonomi tinggi (Prayuda, 2019)

Blue Economy adalah konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya laut dan kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang terkait dengan laut, seperti perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, dan konservasi lingkungan laut. *Blue economy* bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara

pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, sehingga sumber daya laut dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan masa depan.

Konsep *Blue Economy* yang dimana bertumpu pada suatu pengembangan ekonomi didalam rakyat secara komprehensif, untuk mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsep dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini sama halnya dengan konsep *blue economy* saat ini yang telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Boediono, 2021). Bahkan Presiden RI dalam berbagai forum internasional telah menjadi pelopor dalam mempromosikan penerapan konsep-konsep pembangunan yang berkelanjutan. Melihat hal tersebut, KKP yang bergerak di bidang sektor kelautan dan perikanan juga harus berada digaris terdepan guna untuk mempromosikan dan juga melaksanakan prinsip-prinsip yang ada untuk konsep pembangunan yang berkelanjutan ini.

Blue Economy hanya akan menjadi sebuah konsep semata tanpa ada peran *entrepreneurs* atau investor. Suatu terobosan yang luar biasa ini, mendapat sambutan yang positif dari kalangan pemerintah kita, dan beberapa kali pemerintah terus mengupayakan agar konsep *blue economy* ini dapat dikembangkan di Indonesia guna ikut berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. *Blue economy* ini menawarkan suatu terobosan agar partisipatif dari masyarakat mendapatkan tempat yang sewajarnya, bukan menghalang-halangi apa lagi melarang upaya gotong royong masyarakat dalam menciptakan suatu kreasi yang baru yang menguntungkan masyarakat dan kelompoknya atau organisasi secara mandiri.

Blue Economy ini dianggap sangat cocok untuk dijadikan sebagai basis ekonomi yang berkepanjangan untuk kedepannya. Konsep *Blue Economy* yang diperkenalkan oleh Gunter Pauli sangat menarik untuk dipahami dan diterapkan, khususnya oleh Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan dengan potensi kelautan yang cukup besar namun minim lahan untuk pertanian.

Sampai saat ini pada bagian sektor kelautan yang ada di Kepulauan Riau masih sangat sedikit untuk mampu dimanfaatkan keuntungannya. Berdasarkan data BPS Kepri tahun 2020, sekitar 1,8 persen perekonomian di Kepulauan Riau yang berasal dari sektor perikanan (KUSNADI, 2021). Sementara, mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Riau tersebut bekerja di sektor manufaktur tersebut, dalam persentase yang ada yaitu sekitar 26 persen. Sementara itu untuk di sektor perikanan masih di bawah 8 persen angka ini masih terbilang sangat jauh dan kecil. Implementasi *Blue Economy* dapat menjadi salah satu solusi untuk pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang semakin meningkat serta sekaligus mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai aktifitas di bidang kelautan.

Melalui Kerjasama negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN 2023 yang mengangkat tema tentang “*Epicentrum of Growth*”, kawasan ASEAN dengan berbagai keunggulan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi sebuah jangkar stabilitas global dan pusat pertumbuhan global di masa depan, termasuk pertumbuhan ekonomi biru. Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 telah mengangkat ASEAN *Blue Economy* Framework sebagai salah satu prioritas utama pada bidang

ekonomi. Potensi *Blue Economy* yang berada di wilayah Kepulauan Riau ini tercatat memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menunjang perekonomian Indonesia hanya saja pengelolannya yang masih terbilang cukup lambat.

Dalam mendukung potensi perkembangan *Blue Economy* di wilayah Kepulauan Riau ini diperlukannya Kerjasama dan koordinasi dari pihak pemerintah Kepulauan Riau dan juga masyarakat di wilayah tersebut untuk saling bekerjasama dalam membangun wilayah *Blue Economy* tersebut. Dengan adanya Kerjasama tersebut tentunya akan memudahkan wilayah di Kepulauan Riau itu mempunyai pembangunan yang berkelanjutan dengan mudah tentunya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

Model implementasi *Blue Economy* yang meliputi promosi *Good Governance*, pengembangan wilayah *Blue Economy*, dan model investasi *Blue Economy* menuju penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien. Kebijakan implementasi dari *Blue Economy* ini dinilai akan sangat menguntungkan dan dinilai baik dikarenakan sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan pengembangan *Blue Economy* ini dan berhasil meningkatkan integrasi di berbagai sektor produksi dan limbah.

Dalam perwujudan implementasi *Blue economy* di wilayah Kepulauan Riau diperlukannya keharusan dalam penerapan yang ditempuh adalah dengan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Secara *Blue economy* ini merupakan interkoneksi, yang diartikan dalam sifat membangun dan tidak destruktif. Hal ini juga berkaitan dengan aspek-aspek terkait dengan social dan

ekonomi dalam memproteksi lingkungan dan berkelanjutan (Irman, 2021). Permasalahan yang terjadi di Kepulauan Riau ini menandakan diperlukannya pelestarian dan perlindungan pada wilayah-wilayah yang diyakini dapat menumbuhkan perekonomian di sekitar wilayah pesisir di Kepulauan Riau.

Kondisi ekosistem di wilayah pesisir di beberapa daerah Kepulauan Riau masih memasuki kategori rusak dan dibutuhkannya perawatan dan perlindungan di satu sisi ekosistem tersebut dapat memberikan keuntungan bagi para masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk mengelolah wilayah tersebut menjadi sumber perekonomian. Menjadi salah satu factor utama penghambat perekonomian penduduk di wilayah pesisir ekosistem yang rusak membuat penurunan ekonomi yang didapat oleh masyarakat tersebut. Karena hal tersebutlah dibutuhkan pengimplementasian dalam kerja sama IMT-GT ini dalam mendorong perekonomian *Blue Economy* di wilayah Kepulauan Riau.

Dengan adanya statemen seperti ini tentu memberikan gambaran yang buruk mengenai kerusakan ekosistem yang ada. Dengan begitu, segala aspek pembangunan yang ada diseluruh dunia hendaknya berasaskan berkelanjutan dan khususnya memerhatikan isu *blue economy* tersebut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau yang disingkat SDGs ini ialah diyakini dapat mengatasi permasalahan polemic global yang ada. SDGs ini disepakati langsung dalam forum PBB dengan diikuti sebanyak 193 negara termasuk Indonesia pada tanggal 25 September 2015 (Programme, 2022). Agenda SDG sendiri merupakan sebuah turunan dari konsep

sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*). Dengan adanya beberapa program yang masih belum maksimal dari MDGs, maka penyempurnaannya dilanjutkan pada agenda SDGs ini dengan capaian hingga tahun 2030.

Namun, dalam menerapkan konsep perkembangan *Blue Economy* di wilayah Kepulauan Riau ini akan sangat terbantu dan mudah untuk diterapkan jika terealisasikan Kerjasama antar negara dalam bentuk regional untuk membantu mengimplementasikan konsep *Blue Economy* ini di wilayah Kepulauan Riau. Salah satu Lembaga Kerjasama regional yang dapat membantu mengimplementasikan konsep perkembangan ini ialah IMT-GT atau Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle*. Kerjasama regional antara 3 negara ini dibangun khususnya untuk meningkatkan Kerjasama dalam berbagai sektor yang khususnya berada di sektor perekonomian sebuah negara, termasuk sektor kelautan dan juga perikanan.

Dengan adanya Kerjasama IMT-GT ini memudahkan pemerintahan Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada dalam mendukung mendorong *Blue Economy* di wilayah Kepulauan Riau ini. Diperlukannya juga kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan ini sekaligus menolong masyarakat untuk menaikkan pendapatan perkapitanya. Implementasi konsep *Blue Economy* sendiri di Indonesia masih menuai pro dan kontra yang dimana disatu sisi konsep *Blue Economy* ini sangat memberikan berbagai dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat yang bergantung langsung dengan laut. (Anggria, 2022)

Sedangkan untuk kontranya implementasi *Blue Economy* ini masih terbilang cukup terhambat dikarenakan kurangnya edukasi terhadap masyarakat setempat yang khususnya bergantung dengan hasil laut tentang konsep *Blue economy* ini. Masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang konsep *Blue Economy* akan membuat konsep pembangunan berkelanjutan menjadi terhambat, dikarenakan masyarakat masih mengutamakan konsumsi dan pemanfaatan dari laut itu saja tetapi tidak melihat dari sisi keselamatan ekosistem nya juga yang padahal ini sangat bergantung dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini (Anggria, 2022).

Melihat perairan di wilayah Kepulauan Riau sendiri yang dimana didominasi Sebagian wilayahnya ialah lautan membuat konsep *Blue Economy* ini sangat layak untuk diterapkan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan berbasis *Blue Economy*. Hanya saja di wilayah ini ekosistem-ekosistem masih banyak yang rusak dikarenakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tersebut hamper sepenuhnya bermata pencarian nya ialah nelayan, yang dimana masyarakat tersebut hanya tau untuk menggunakan keuntungan dari laut itu saja dibandingkan dengan memikirkan ekosistem nya juga hal inilah yang membuat terjadinya degradasi ekosistem biota di wilayah pesisir (Alfiandri, 2020).

Pembangunan berkelanjutan berbasis *Blue Economy* di wilayah Kepulauan Riau masih harus menjadi perhatian penuh dikarenakananya masih diperlukanya kesiapan masyarakat yang khususnya bergantung dengan hasil laut tersebut untuk tidak hanya memikirkan hasil lautnya saja melainkan diperlukannya edukasi untuk menjaga ekosistem itu pula. Dengan adanya konsep *Blue Economy* ini tentunya

akan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi berpeluang tinggi untuk masa yang akan datang dan berjangka waktu cukup Panjang untuk dinikmati hasil laut dengan ekosistem yang terjaga.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas tentang peran dari kerjasama regional IMT-GT dalam mendorong perkembangan Blue Economy di wilayah Kepulauan Riau, melalui studi kasus implementasi program Kerjasama IMT-GT dan dampaknya terhadap Pembangunan ekonomi local di Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk dapat memeberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kontribusi dari adanya Kerjasama regional antar negara negara yang terkait kedalam IMT-GT untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah Kepulauan Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah Bagaimana implementasi dari kerjasama sub regional IMT-GT dalam mendorong perkembangan *Blue Economy* di Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi yang telah dilakukan dari adanya Kerjasama sub regional IMT-GT yang dilakukan untuk mendorong perkembangan *Blue Economy* di Kepulauan Riau.

2. Memberikan rekomendasi atau berbagai pilihan kebijakan untuk pemerintah dan stakeholders terkait Upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di wilayah Kepulauan Riau.

3. Menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi untuk bisa menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai *Blue Economy* dan Kerjasama regional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bentuk kontribusi yang berkemanfaatan baik untuk penelitian sendiri dan juga perkembangan ilmu pengetahuan terlebih dalam studi hubungan internasional.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang peran pemerintah dalam mengatur dan mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, yang dapat membentuk teori-teori kebijakan.
- b. Meningkatkan Pengetahuan peneliti dan juga pembaca mengenai strategi pemerintahan Kepulauan Riau dalam mengatasi tantangan dari Implementasi *Blue Economy*
- c. Memahami cara mengembangkan teori ekonomi baru yang mempertimbangkan aspek-aspek unik dari pemanfaatan sumber daya laut dan ekosistem terkait. Ini memperkaya kerangka kerja ekonomi makro dan mikro.
- d. Pemahaman Terhadap Keterkaitan Ekosistem Penelitian *blue economy* membantu dalam pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara berbagai

elemen ekosistem laut dan dampaknya pada ekonomi. Ini dapat memperkaya teori ekologi dan ekonomi ekosistem.

e. Dengan memfokuskan pada ekonomi dan keberlanjutan kelautan, penelitian *blue economy* dapat membantu pengembangan teori-teori khusus dalam ilmu kelautan.

